

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, dimana negara Indonesia menganut asas desentralisasi, oleh sebab itu maka setiap daerah-daerah di Indonesia berbentuk daerah otonom. Definisi desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Philipus M. Hadjon (2005:270), desentralisasi merupakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut diserahkan dan dibiarkan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

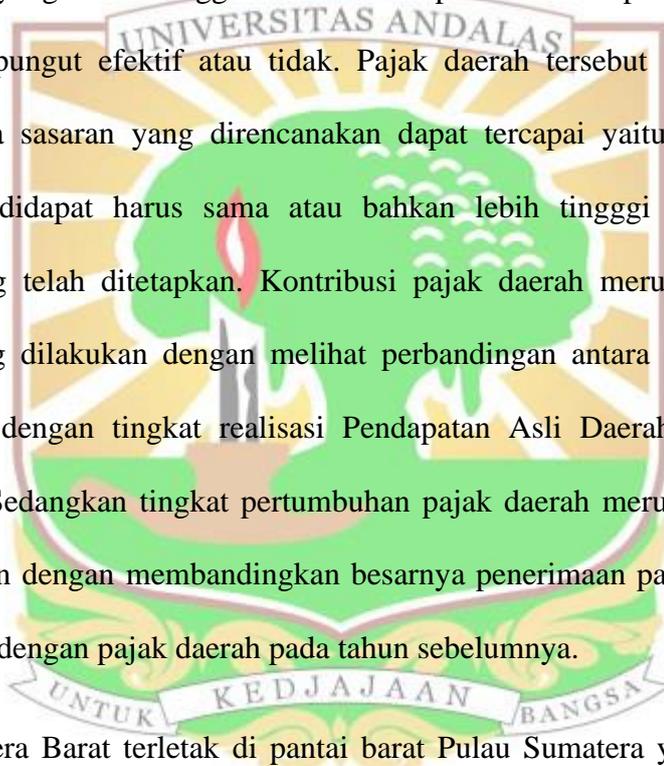
Dengan adanya desentralisasi, diharapkan daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi. Dengan adanya prinsip otonomi tersebut setiap daerah dituntut untuk mengedepankan kemandirian daerah, salah satunya yaitu kemandirian dalam bidang keuangan. Keuangan merupakan hal yang penting, karena setiap kegiatan pemerintah dan pembangunan selalu membutuhkan biaya. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat memaksimalkan potensi

yang ada serta mempunyai kewenangan mengatur dan mengeluarkan kebijakan tertentu.

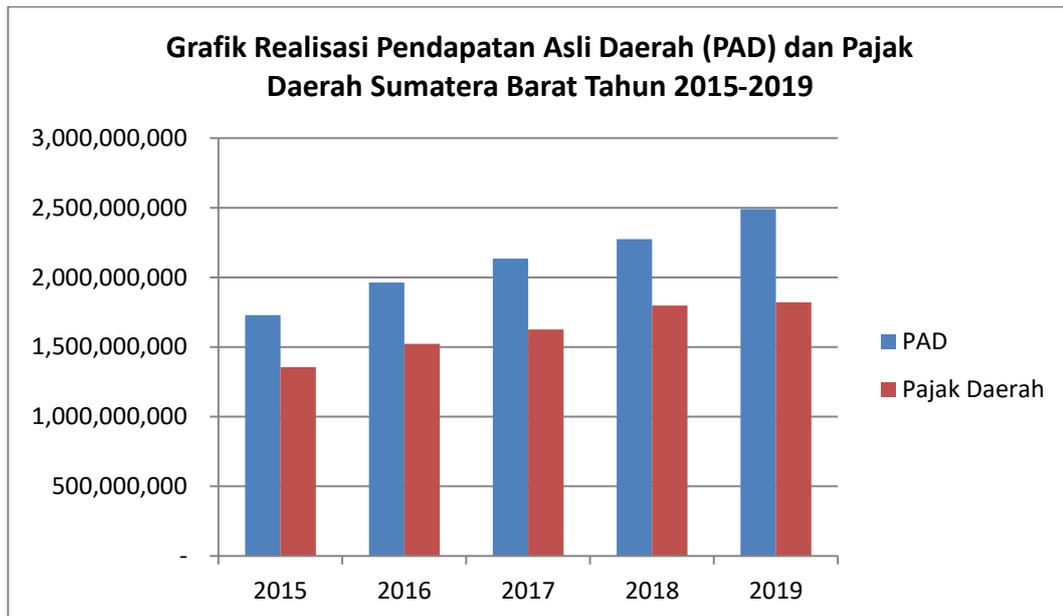
Salah satu potensi paling besar sebagai sumber dana pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Siahaan (2010 : 5) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting dalam membiayai urusan pemerintahan daerah, baik dalam membiayai tugas-tugas umum pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah secara terus menerus menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dalam sektor pajak daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pajak daerah menurut Siahaan (2010:7) adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Untuk dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah, maka perlu diketahui efektivitas pajak daerah, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tingkat pertumbuhan pajak daerah dari tahun ke tahun. Efektivitas pajak daerah merupakan suatu penilaian kinerja pemungutan pajak daerah selama satu tahun anggaran, dimana dalam penilaian ini dilakukan perbandingan antara persentase penerimaan pajak daerah yang telah terealisasi dengan target yang telah dianggarkan. Disini dapat kita lihat apakah pajak daerah yang telah dipungut efektif atau tidak. Pajak daerah tersebut dapat dikatakan efektif apabila sasaran yang direncanakan dapat tercapai yaitu realisasi pajak daerah yang didapat harus sama atau bahkan lebih tinggi daripada target anggaran yang telah ditetapkan. Kontribusi pajak daerah merupakan indikator penilaian yang dilakukan dengan melihat perbandingan antara tingkat realisasi pajak daerah dengan tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan. Sedangkan tingkat pertumbuhan pajak daerah merupakan penilaian yang dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan pajak daerah pada tahun tertentu dengan pajak daerah pada tahun sebelumnya.



Sumatera Barat terletak di pantai barat Pulau Sumatera yang merupakan salah satu provinsi paling besar di Pulau Sumatera. Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota di provinsi ini memiliki potensi daerah yang mampu menunjang penerimaan pajak daerah yang akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut grafik penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah Sumatera Barat tahun anggaran 2015-2019 :



Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Sumatera Barat Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak daerah Sumatera Barat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 Sumatera Barat berada dalam urutan ke 14 dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dan urutan ke 5 dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera yaitu sebesar Rp 2.491.393.000.000. Begitu juga dengan pajak daerah Sumatera Barat berada pada urutan ke 14 se Indonesia dan urutan ke 5 se Pulau Sumatera yaitu sebesar Rp 1.821.885.000.000. Jadi, Sumatera Barat termasuk kedalam provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, secara keseluruhan pajak daerah memiliki kontribusi sebesar 73,13% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang ada di Sumatera Barat, dimana berdasarkan rasio kontribusi pajak daerah tersebut termasuk ke dalam kriteria sangat baik. Berikut tabel mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015-2019 :

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

No.	Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1.	Kota Padang	370.414	391.926	548.653	487.938	546.109	469.008
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	107.992	108.915	178.145	123.907	134.805	130.753
3.	Kabupaten Tanah Datar	112.073	118.971	172.812	115.914	129.786	129.911
4.	Kabupaten Agam	90.197	102.597	161.539	99.684	123.659	115.535
5.	Kabupaten Pasaman Barat	69.129	91.175	158.921	104.524	104.072	105.564
6.	Kabupaten Pasaman	79.684	88.862	142.748	100.067	98.596	101.992
7.	Kota Payakumbuh	100.647	87.445	116.596	94.287	104.070	100.609
8.	Kabupaten Padang Pariaman	72.996	72.859	141.311	84.503	101.608	94.655
9.	Kota Bukittinggi	66.027	71.304	102.376	101.937	111.897	90.708
10.	Kabupaten	65.008	76.834	107.916	79.056	83.906	82.544

	Sijunjung						
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	62.933	68.060	119.772	73.441	85.168	81.875
12.	Kabupaten Padang Panjang	67.036	70.357	88.837	79.752	77.323	76.661
13.	Kabupaten Dharmasraya	56.694	56.454	98.937	84.116	78.883	75.017
14.	Kabupaten Solok	55.611	58.803	113.270	68.302	74.596	74.116
15.	Kabupaten Solok Selatan	41.207	51.138	75.506	60.545	67.843	59.248
16.	Kota Sawahlunto	52.269	53.389	62.460	47.227	57.171	54.503
17.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	42.785	41.948	67.863	45.358	40.204	47.632
18.	Kota Solok	36.631	42.117	41.853	40.743	41.652	40.599
19.	Kota Pariaman	29.897	29.681	30.882	32.213	36.665	31.868

Sumber : sumbar.bpk.go.id

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun

Anggaran 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

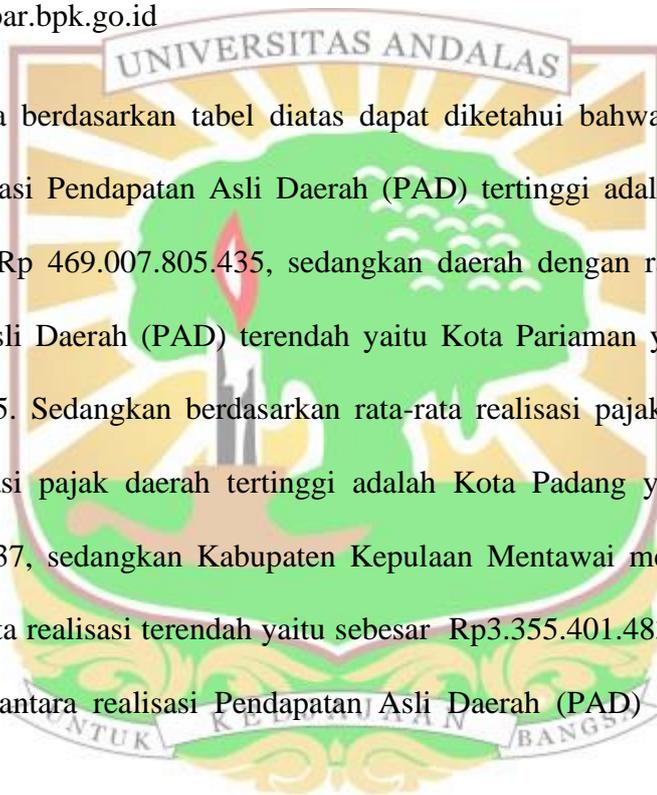
No.	Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1.	Kota Padang	232.870	256.747	327.917	348.898	388.095	310.905
2	Kota Bukittinggi	29.002	30.710	38.282	45.131	45.204	37.666

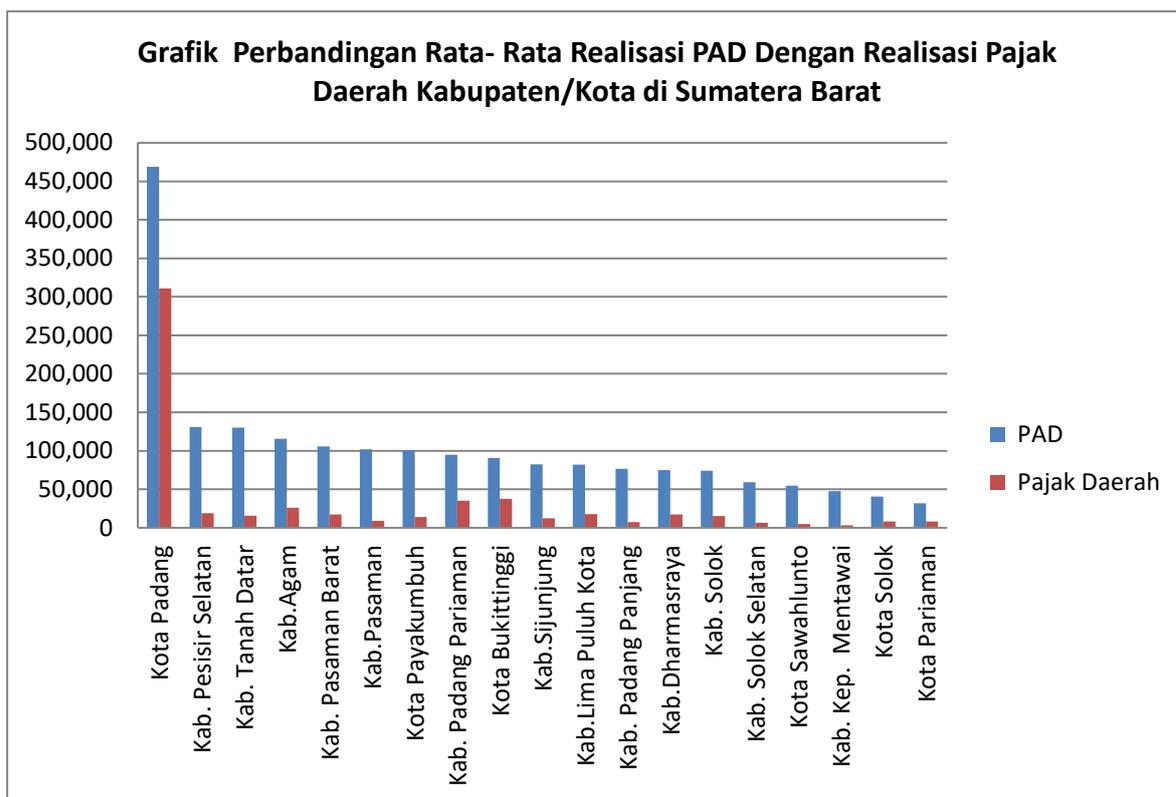
3	Kabupaten Padang Pariaman	23.041	26.922	36.853	41.412	48.302	35.306
4.	Kabupaten Agam	19.122	21.399	27.494	31.337	31.515	26.173
5	Kabupaten Pesisir Selatan	14.420	13.713	19.795	23.752	23.798	19.096
6	Kabupaten Lima Puluh Kota	12.105	14.061	17.667	20.370	24.181	17.677
7	Kabupaten Pasaman Barat	13.363	13.693	17.966	20.814	20.941	17.356
8	Kabupaten Dharmasraya	10.643	11.543	14.933	29.231	19.179	17.106
9	Kabupaten Tanah Datar	10.873	11.771	16.523	19.847	19.578	15.719
10	Kabupaten Solok	10.848	11.441	14.718	19.015	20.193	15.243
11	Kota Payakumbuh	10.765	11.034	14.047	16.093	17.651	13.918
12	Kabupaten Sijunjung	8.146	10.787	13.428	14.110	14.285	12.151
13	Kabupaten Pasaman	7.526	8.579	8.925	9.681	10.398	9.022
14	Kota Solok	6.320	6.787	8.339	9.261	10.669	8.275
15	Kota Pariaman	5.962	6.647	8.305	9.983	10.065	8.192
16	Kota Padang Panjang	5.557	6.134	6.906	8.294	9.049	7.188

17	Kabupaten Solok Selatan	4.415	4.955	6.991	7.619	8.435	6.483
18	Kota Sawahlunto	4.099	4.686	5.337	5.546	5.503	5.034
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.914	2.528	2.647	4.473	5.214	3.355

Sumber : sumbar.bpk.go.id

Dimana berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa daerah dengan rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp 469.007.805.435, sedangkan daerah dengan rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah yaitu Kota Pariaman yaitu sebesar Rp 31.867.679.335. Sedangkan berdasarkan rata-rata realisasi pajak daerah, daerah dengan realisasi pajak daerah tertinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp 310.905.381.337, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah dengan rata-rata realisasi terendah yaitu sebesar Rp3.355.401.483. Berikut grafik perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi pajak daerah :

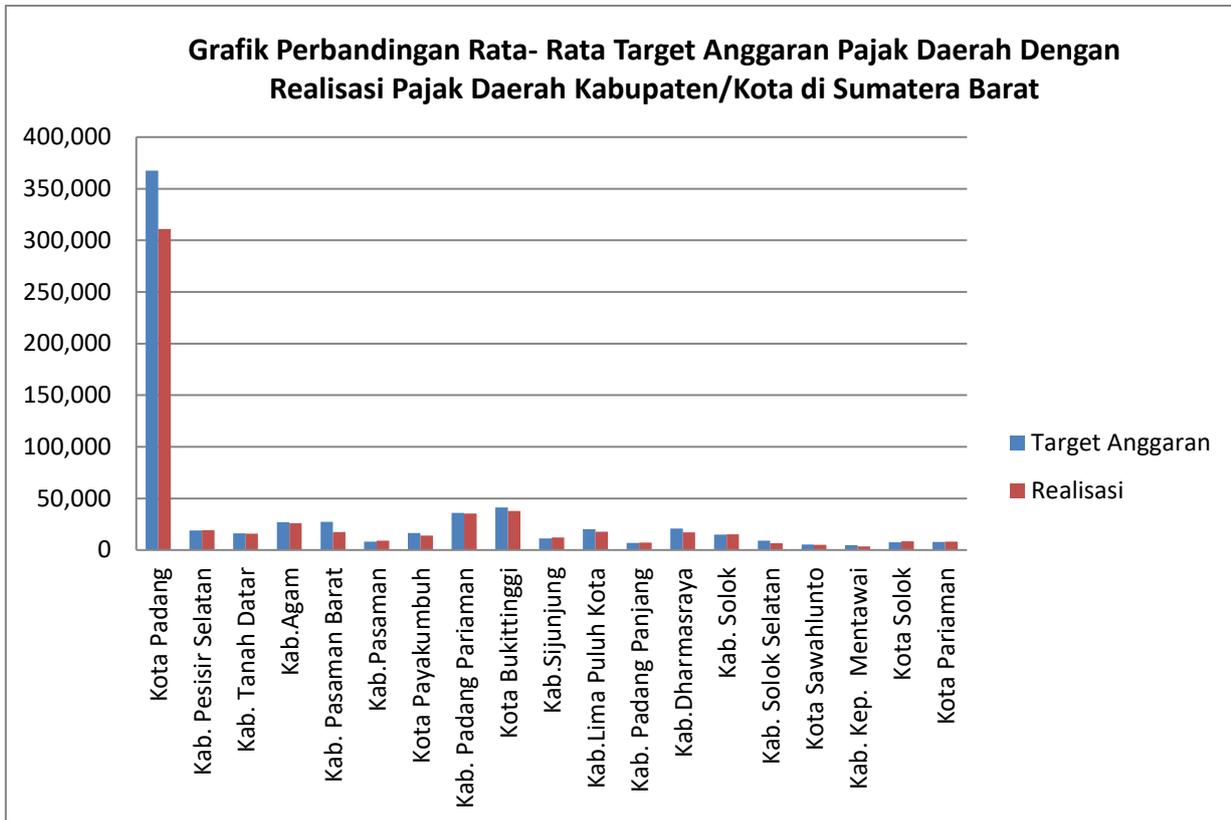




Gambar 1.2 Perbandingan Rata- Rata Realisasi PAD Dengan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Dimana berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa perbandingan antara rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi pajak daerah pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Sehingga perlu diketahui lebih lanjut apakah pajak daerah yang telah terealisasi tersebut memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat, mengingat bahwa Sumatera Barat berada pada urutan ke 14 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia artinya berada pada urutan yang tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Berikut grafik perbandingan antara rata-rata target anggaran pajak daerah dengan rata-rata realisasi pajak daerah yang ada pada kabupaten/kota di Sumatera



Barat :

Gambar 1.3 Perbandingan Rata - Rata Target Anggaran Pajak Daerah Dengan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Dimana berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa antara rata-rata target anggaran dengan rata-rata realisasi pajak daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan. Sehingga perlu diketahui lebih lanjut apakah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah efektif atau tidak. Pajak daerah dapat dikatakan efektif apabila besarnya target

anggaran yang telah ditetapkan sama dengan atau bahkan lebih tinggi dari pada realisasi pajak daerah yang didapatkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana efektivitas penerimaan pajak daerah, tingkat pertumbuhan pajak daerah per tahun dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat serta perbandingan rasionya ?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah per tahun pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat serta perbandingan rasionya ?
3. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat serta perbandingan rasionya ?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah di masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat dan mengetahui rasio perbandingan masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pajak daerah per tahun pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat dan mengetahui rasio perbandingan masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat dan mengetahui rasio perbandingan masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta berguna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji ulang permasalahan ini dalam penelitian yang akan datang.

3. Bagi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tentang pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari skripsi yang akan ditulis yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan penelitian yang merupakan gambaran mengenai isi penelitian yang akan dibahas.

BAB II STUDI LITERATUR

Bab ini memaparkan teori-teori dan konsep dasar dari objek yang akan diteliti beserta penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode terkait dengan penelitian seperti jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian serta hasil dari penelitian yang dilakukan dimana pada bab ini akan diketahui analisis data yang dilakukan serta jawaban dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan serta saran dari peneliti terkait penelitian yang dilakukan.

